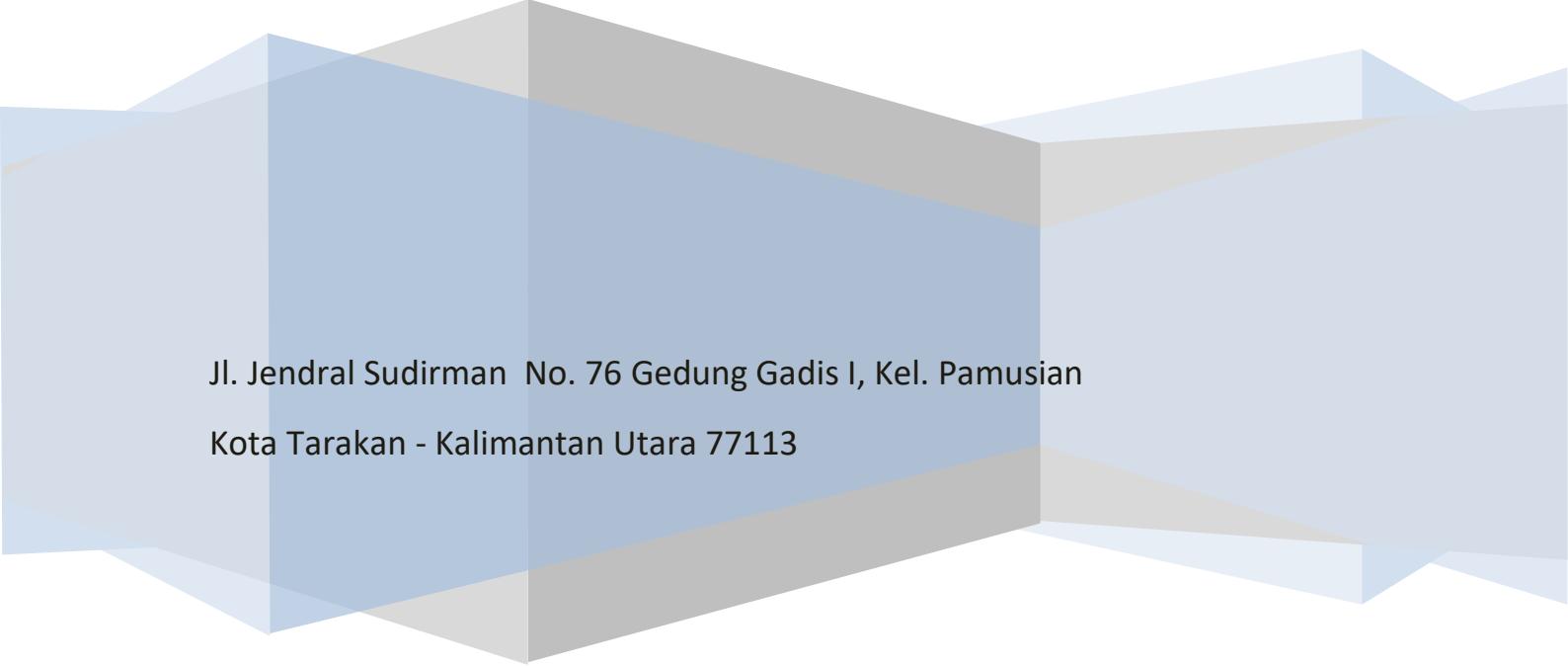


**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**RENCANA STRATEGIS**

**Tahun 2025-2026**



Jl. Jendral Sudirman No. 76 Gedung Gadis I, Kel. Pamusian  
Kota Tarakan - Kalimantan Utara 77113



**RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA**

**BERENCANA**

**Tahun 2025-2026**

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

## KATA PENGANTAR



## Kata Pengantar

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas berkat Rahmat dan Karunianya sehingga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025-2026 ini selesai disusun sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Renstra Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025-2026 merupakan dokumen Rencana Strategis yang memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran yang berbasis kinerja. Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai setiap tahun dan kurun waktu dua tahun, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan.

Dokumen Rencana Strategis ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Kota Tarakan Tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 dan menjadi informasi publik, mitra kerja dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana..

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dalam penyusunan Renstra dan dukungan instansi lain. Semoga Rencana Strategis ini memberikan penjelasan yang memadai dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tarakan, Pebruari 2024  
Kepala Dinas,



**Hasman Parigi, S.E., M.M**  
Pembina / IVa  
NIP. 19720822 2010011 001

*DAFTAR ISI*



**Daftar Isi**

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	v
Halaman Pengesahan .....	vi
1. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
2. Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.....	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	13
2.2. Sumber Daya .....	25
2.3. Kinerja Pelayanan .....	30
2.4. Kelompok Sasaran Layanan .....	41
3. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis .....	42
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	43
4. Tujuan dan Sasaran.....	47
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	48
4.2. Cascading Kinerja .....	50
5. Strategi dan Arah Kebijakan.....	80
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....	81
6. Rencana, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan .....	92
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	120
8. Penutup .....	127
Lampiran .....	

## *DAFTAR TABEL*



## Daftar Tabel

Tabel 2.2.1.	Jumlah Pegawai DP3APPKB Kota Tarakan per Desember 2023 .....	25
Tabel 2.2.2.	Analisa kebutuhan ASN Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2023.....	26
Tabel 2.2.3.	Jumlah Sarana dan Prasarana DP3APPKB Kota Tarakan per Desember 2020.....	28
Tabel 2.2.4.	Analisa Kebutuhan dan Kekurangan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan .....	29
Tabel 2.3.1.	Capaian Kinerja DP3APPKB Kota Tarakan TA 2020-20232 .....	35
Tabel 2.3.3.1.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan DP3APPKB Kota Tarakan TA 2020-2023 .....	38
Tabel 2.3.3.2.	Anggaran dan Realisasi Serapan Pendanaan DP3APPKB TA 2020-2023 .....	39
Tabel 4.1.	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran DP3APPKB Kota Tarakan TA 2025-2026 .....	49
Tabel 4.2.	Cascading Kinerja DP3APPKB Kota Tarakan TA 2025-2026 .....	51
Tabel 5.1.	Strategi dan Arah Kebijakan DP3APPKB Kota Tarakan TA 2025-2026 .....	82
Tabel 6.1.	Rencana Program dan Pendanaan DP3APPKB Kota Tarakan TA 2025-2026 .....	94
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Utama DP3APPKB Kota Tarakan TA 2025-2026 .....	122
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Kunci DP3APPKB Kota Tarakan TA 2025-2026 .....	123
Tabel 7.3.	Cara Perhitungan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan .....	125

## *DAFTAR GAMBAR*



## Daftar Gambar

Gambar 1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Gambar 2 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

# *HALAMAN PENGESAHAN*





**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**Jl. Jend. Sudirman No. 76, Gedung Gadis I Kel. Pamusian, Kota Tarakan 77113**

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2026**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN**

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : Pebruari 2024

Kepala Bidang Pemerintahan dan  
Pembangunan Manusia

Perencana Ahli Muda

**EFFI SUSANTI, S.Pt.**

Pembina/IV a  
NIP. 19700829 199803 2 003

**DENY PUSPITA RINI, S.Sos.**

Penata TK I / III d  
NIP. 197703262002122001

Mengetahui,  
KEPALA BAPPEDA LITBANG  
KOTA TARAKAN

**Dr. CATUR HENDRATMO, STP., MM.**

Pembina Tk. I  
NIP. 19730501 200502 1 003

## I. PENDAHULUAN



## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2017 tentang tar acara perencanaan pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perangkat Daerah di wajibkan Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Tahun 2024 masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan akan berakhir sedangkan Pemilihan Kepala Daerah ( Gubernur, Walikota / Bupati ) akan dilakukan secara serentak pada Bulan Nopember 2024. Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024.

Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2024 sehingga Pemerintah Kota Tarakan perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD secara sistematis untuk kurun waktu 2 (Dua)

tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan/sub kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 2 (dua) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi SDM, dan pengawasan kinerja. Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen, dari unsur pimpinan dan staf, dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan.

Untuk merealisasikan capaian kinerja dari rencana tersebut dituangkan dalam visi, misi, tujuan, dan pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, secara jelas dan praktis, serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya, dan pencapaian sasaran yang berguna bagi organisasi dalam kurun waktu yang ditentukan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem, serta intensitas koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya urusan serta program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan tujuan dan sasaran, sehingga Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didasarkan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 dengan memperhatikan adanya kekuatan, kelemahan peluang yang ada, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk periode 2 (dua) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) Pelaksanaan Forum Pemerintah Daerah; (5) Penyusunan Rencana Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, Peraturan Kepala Daerah Kota Tarakan tentang Tugas dan Fungsi DPPPAPPKB, RPJMD Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tarakan.

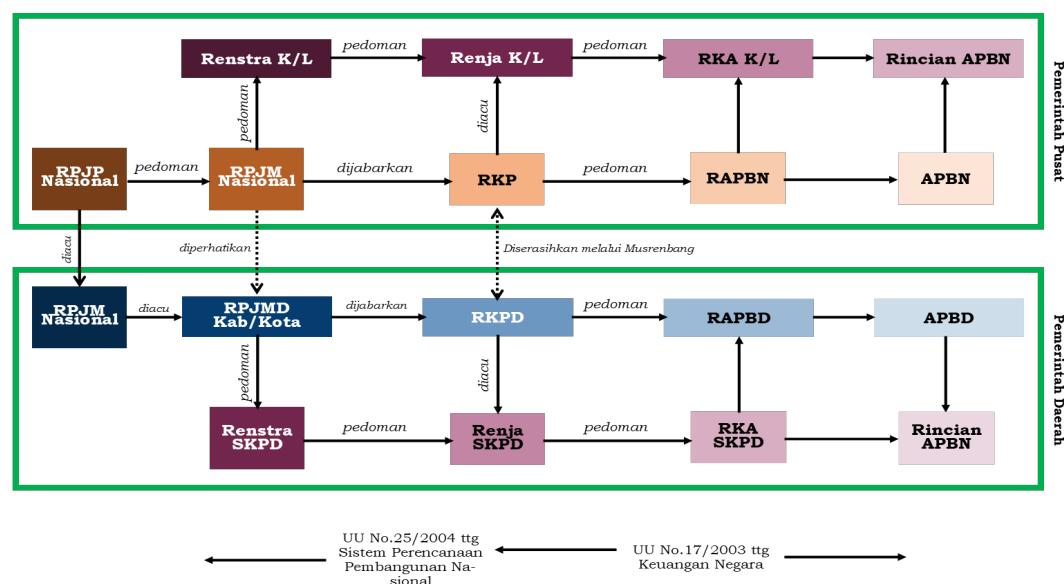
Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang disusun setiap tahun selama kurun waktu dua tahun. Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan akan menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan RKA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

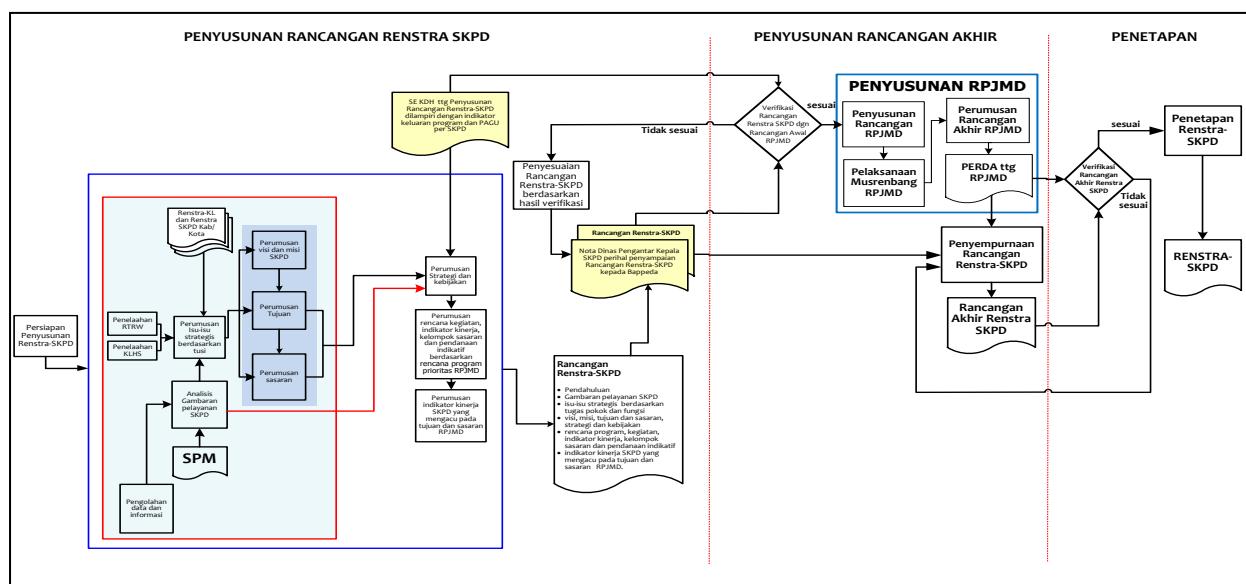
Gambaran tentang hubungan antara Renstra Tahun 2025-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan berikut ini:

Gambar 1.1  
Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2  
Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD)



## 1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Perlindungan Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah Perubahan Rencana Strategis DPPPAPPKB 2019-2024 5 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraaan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Perka BKKBN No. 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
31. Keputusan Menteri PPA No. 130 Tahun 2023 tentang Indeks Kinerja Utama
32. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2009 Tentang RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
34. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023;
35. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
36. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
37. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor ..... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026.
38. Keputusan Walikota Tarakan Nomor ..... Tahun 2023 tentang susunan Tim Penyusunan Renstra DPPPAPPKB Tahun 2025 – 2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

---

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode tahun anggaran 2025 – 2026 adalah:

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan dibidang administrasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta menyediakan tolak ukur dalam penetapan kinerja selama 2 (dua) tahun.
2. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 2 (dua) tahun kedepan.
3. Menyesuaikan rencana target capaian Renstra PD dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan periode Tahun Anggaran 2025 - 2026 yang mengalami perubahan dan penyesuaian dengan kemampuan Anggaran Pemerintah daerah.
4. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan program prioritas seusai dengan urusan pemerintahan di bidang administrasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan.
6. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan periode Tahun Anggaran 2025-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Menterjemahkan dan menjabarkan yang termuat dalam RPD Kota Tarakan periode Tahun Anggaran 2025-2026 dalam bentuk tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih spesifik dan terarah serta yang bersifat operasional

2. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama 2 (dua) tahun
3. Sebagai dasar penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

---

Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I. Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Strategis
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**Bab II. Gambaran Pelayanan**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

**Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis**

- 3.1 Permasalahan Pelayanan
- 3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

**Bab IV. Tujuan dan Sasaran**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran
- 4.2 Cascading Kinerja

**Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan**

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

**Bab VI.** Rencana, Program dan Kegiatan serta Pendanaan

**Bab VII.** Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

**Bab VIII.** Penutup

***II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK SERTA  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA***



## 2. Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

#### 2.1.1. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 68 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

#### 2.1.2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 68 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

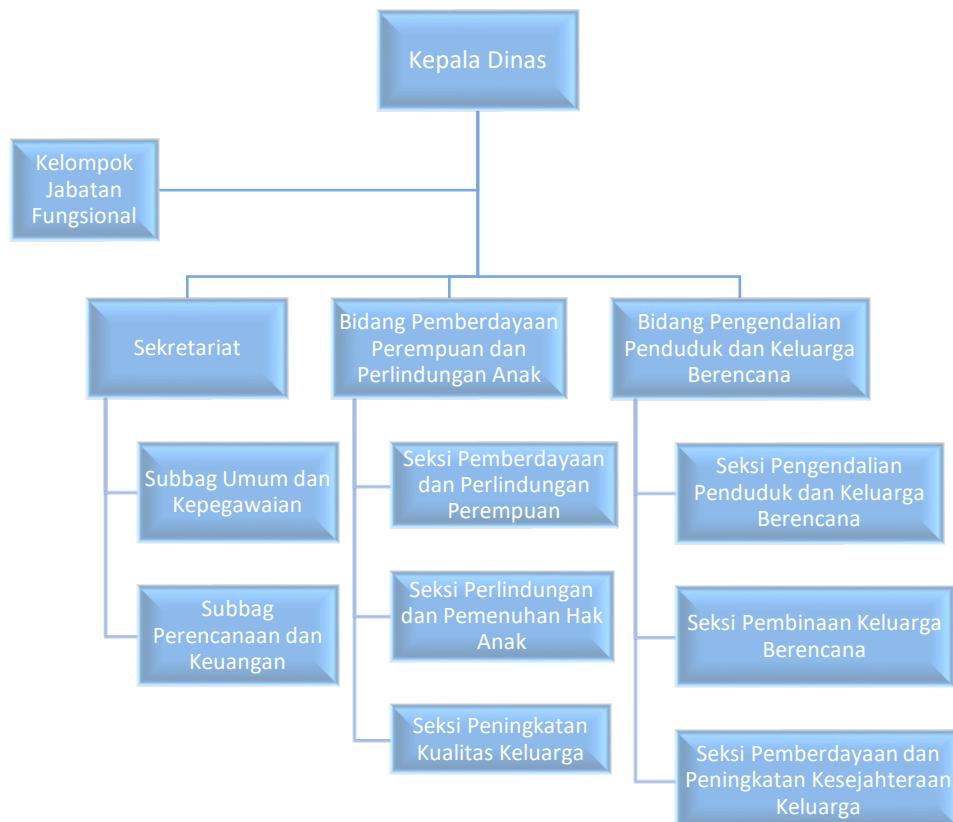
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 2.1.3 Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Nomor 68 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat;
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:



## 1. Kepala Dinas

### a. Tugas

1. Melaksanakan tugas pokok di bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan daerah;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah
3. Tugas pertolongan yang diberikan kepada daerah.

### b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat adalah merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan membantu Kepala Dinas.

### a. Tugas

1. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

### b. Fungsi

1. Koordinasi kegiatan dinas;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;

4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
5. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
7. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
8. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja dinas;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan fungsi diatas, sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh 2 (dua)

Sub Bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian masing-masing dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### **1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

#### a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

#### b. Fungsi

1. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
2. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
3. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas;
4. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
5. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

#### a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam koordinasi kegiatan dinas, koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan pengkoordinasian

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

b. Fungsi

1. Koordinasi Kegiatan Dinas;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan.
4. Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja dinas dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### 3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang.

a. Tugas

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangan Dinas.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas keluarga;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas keluarga;
3. Pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah di daerah.
4. Pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan di daerah;
5. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di daerah;
6. Pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah ;

7. Pelaksanaan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi di daerah;
8. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di daerah;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas keluarga;
10. Pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
11. Pelaksanaan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi di daerah;
12. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah;
13. Pelaksanaan upaya pelembagaan Perlindungan Hak Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di daerah;
14. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di daerah;
15. Pelaksanaan upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di daerah;
16. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di daerah;
17. Pelaksanaan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di daerah;
18. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dalam kelembagaan data di daerah; dan
19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, yaitu:

- 1) Seksi pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- 2) Seksi perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- 3) Seksi peningkatan kualitas keluarga.

### **1) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**

Seksi pemberdayaan dan perlindungan perempuan merupakan unsur pelaksana di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### a. Tugas

Menyiapkan bahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang menjadi kewenangan daerah serta melaksanakan tugas pertantuan dibidang pemberdayaan dan perlindungan Perempuan

#### b. Fungsi

1. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
2. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
3. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah di daerah.
4. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan di daerah;
5. penyiapan bahan dan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di daerah;
6. penyiapan bahan dan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
7. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi di daerah;
8. penyiapan bahan dan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di daerah;
9. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi pelaporan dibidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## 2) Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Seksi perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan unsur pelaksana di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Seksi.

### a. Tugas

Menyiapkan bahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan dan pemenuhan hak anak yang menjadi kewenangan Daerah serta melaksanakan tugas pertolongan dibidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.

### b. Fungsi

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak;
2. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak;
3. penyiapan bahan dan pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
4. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi di daerah ;
5. penyiapan bahan dan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah;
6. penyiapan bahan dan upaya pelaksanaan pelembagaan Perlindungan Hak Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di daerah;
7. penyiapan bahan dan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di daerah;
8. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi pelaporan dibidang perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

## 3) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga

Seksi peningkatan kualitas keluarga merupakan unsur pelaksana dibidang peningkatan kualitas keluarga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Seksi.

a. Tugas

Menyiapkan bahan, perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas keluarga yang menjadi kewenangan Daerah serta melaksanakan tugas perbaikan dibidang peningkatan kualitas keluarga.

b. Fungsi

1. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dibidang peningkatan kualitas keluarga;
2. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan kualitas keluarga;
3. penyiapan bahan dan pelaksanaan upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di daerah;
4. penyiapan bahan dan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di daerah;
5. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di daerah;
6. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dalam kelembagaan data di daerah;
7. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi pelaporan dibidang peningkatan kualitas keluarga; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang.

a. Tugas

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah serta melaksanakan tugas pertambuan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

b. Fungsi

1. perumusan kebijakan dibidang perencanaan dan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejateraan keluarga;
2. pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejateraan keluarga;
3. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah di Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
4. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan di daerah;
5. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local;
6. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluhan KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
7. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah ;
8. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
9. pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
10. pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
11. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, yaitu:

- 1) Seksi pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
- 2) Seksi pembinaan keluarga berencana;
- 3) Seksi pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.

## 1) Seksi Pengendalian Penduduk

Seksi pengendalian penduduk merupakan unsur pelaksana di bidang perencanaan dan pengendalian penduduk yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi.

### a. Tugas

Menyiapkan bahan, perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengendalian penduduk sesuai dengan kewenangan daerah serta mengerjakan pekerjaan administrasi di bidang perencanaan dan pengendalian penduduk.

### b. Fungsi

1. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dibidang perencanaan dan pengendalian penduduk;
2. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan pengendalian penduduk;
3. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemanfaatan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah di daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
4. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan di daerah;
5. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengendalian penduduk; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## 2) Seksi Pembinaan Keluarga Berencana

Seksi pembinaan keluarga berencana merupakan unsur pelaksana di bidang keluarga berencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi.

### a. Tugas

Menyiapkan bahan, perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana sesuai dengan kewenangan daerah serta mengerjakan pekerjaan administrasi di bidang keluarga berencana.

b. Fungsi

1. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pembinaan keluarga berencana;
2. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keluarga berencana;
3. penyiapan bahan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
4. penyiapan bahan dan pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluhan KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
5. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah;
6. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
7. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan keluarga berencana; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

**3) Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera**

Seksi pemberdayaan dan peningkatan keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi.

a. Tugas

Menyiapkan bahan, perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera sesuai dengan kewenangan daerah serta mengerjakan pekerjaan administrasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

**b. Fungsi**

1. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
2. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
3. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
4. penyiapan bahan dan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
5. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## **2.2. Sumber Daya**

### **2.2.1 *Sumber Daya (Manusia)***

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2023 jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 44 orang yang terdiri dari ASN 25 orang dan tenaga kontrak sebanyak 6 orang untuk selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2.1

Jumlah Pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan per-Desember Tahun 2023.

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pegawai			
a. PNS	10	15	25
b. Honor Kontrak	4	2	6
Jumlah	14	17	21
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :			
a. Golongan IV	3	1	4
b. Golongan III	7	14	21
c. Golongan II			
d. Golongan I			
Jumlah	10	15	25

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan:			
a. Kepala Dinas	1		1
b. Sekretaris		1	1
c. Administrator	1	1	2
d. Kapala Sub Bagian	1	1	2
e. Jabatan Fungsional Tertentu	1	5	6
Jumlah	4	8	12
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan:			
a. S2	2	1	3
b. S1	6	14	20
c. D3	2		2
d. SMA			
e. SMP			
Jumlah	10	15	25
Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan:			
a. Spamen			
b. Spama/Diklat PIM III	1		1
c. Adum/Adumla/Diklat PIM IV	4	4	8
Jumlah	5	4	9

Jumlah pegawai ideal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sesuai analisa jabatan adalah sebanyak 38 orang, namun pegawai ASN yang ada 25 orang, tenaga bantuan 6 orang, sehingga baru terpenuhi sebesar 31 orang atau 83,78%.

Berikut ini tabel analisa kebutuhan ASN pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sesuai perhitungan analisis beban kerja tahun 2023:

TABEL 2.2.2

Analisa kebutuhan ASN Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2023

No	Susunan Organisasi	Jumlah Pegawai	Standar Kebutuhan	Perhitungan Analisis Beban Kerja	Kekurangan
1.	Kepala Dinas	1 orang	1 orang	-	-
2.	Sekretariat	7 orang	10 orang	Ada / 8,989 (Jumlah Beban Kerja 1 Tahun X)	2,507 / 3 orang Analisa Beban Kerja yang

				Waktu Penyelesaian (Menit) : Waktu Penyelesaian Efektif )	seharusnya – Analisa Beban Kerja yang mampu diselesaikan oleh personil yang ada saat ini : $8,989 - 6482 = 2,507$
3.	Bidang PPPA	8 orang	9 orang	Ada / 6,150 (Jumlah Beban Kerja 1 Tahun X Waktu Penyelesaian (Menit)) : Waktu Penyelesaian Efektif )	0,768 / 1 orang Analisa Beban Kerja yang seharusnya – Analisa Beban Kerja yang mampu diselesaikan oleh personil yang ada saat ini : $6,150 - 5,382 = 0,768$
4.	Bidang PPKB	8 orang	10 orang	Ada / 24,063 (Jumlah Beban Kerja 1 Tahun X Waktu Penyelesaian (Menit)) : Waktu Penyelesaian Efektif )	1,780 / 2 orang Analisa Beban Kerja yang seharusnya – Analisa Beban Kerja yang mampu diselesaikan oleh personil yang ada saat ini : $24,063 - 22,283 = 1,780$
5	Jabatan Fungsional Khusus Penyuluhan Soial	-	2 Orang	Beban Kerja yang ada 12,036 (Jumlah Beban Kerja 1 Tahun X Waktu Penyelesaian (Menit)) : Waktu Penyelesaian Efektif )	2 Orang Analisa Beban Kerja yang seharusnya – Analisa Beban Kerja yang mampu diselesaikan oleh personil yang ada saat ini : $12,036 - 0 = 12,036$
6.	Jabatan Fungsional Khusus Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	2 Orang	Beban Kerja yang ada 12,036 (Jumlah Beban Kerja 1 Tahun X Waktu Penyelesaian (Menit)) : Waktu Penyelesaian Efektif )	2 Orang Analisa Beban Kerja yang seharusnya – Analisa Beban Kerja yang mampu diselesaikan oleh personil yang ada saat ini : $12,036 - 0 = 12,036$

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dilengkapi dengan sarana dan prasarana kantor.

Jumlah jenis sarana dan prasarana berdasarkan kondisinya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tampak pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan per Desember 2020.

Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
	Baik	Rusak	
Mobil Dinas	6 buah	0	6 buah
Sepeda Motor	13 buah	3 rusak	16 buah
Lemari Besi	11 buah	0	11 buah
Lemari Kaca	4 buah	0	4 buah
Lemari Kayu	1 buah	0	1 buah
Rak Kayu	1 buah	0	1 buah
Kursi lipat	143 buah	9 rusak	152 buah
Kursi putar	3 buah	4 buah	7 buah
Meja Biro	40 buah	2 buah	42 buah
Meja Komputer	3 buah	4 buah	7 buah
AC Split	7 buah	0	7 buah
Telivisi	2 buah	0	2 buah
Note book	12 buah	6 buah	18 buah
Printer	10 buah	0	10 buah
Server	1 buah	0	1 buah
Kursi kerja eselon	18 buah	4 buah	22 buah
UPS	5 buah	0	5 buah
Personal Computer	5 buah	4 buah	9 buah
Proyektor + peralatan	9 buah	0	9 buah
Layar	3 buah	0	3 buah
Handycam	2 buah	0	2 buah
Mesin Ketik Manual	3 buah	0	3 buah
Wireless Amplifier	1 buah	0	1 buah
Lemari Es	1 buah	0	1 buah
Facsimile	1 buah	0	1 buah
Spring balance	2 buah	0	2 buah
Lemari pakaian	1 buah	0	1 buah
Kompor gas	1 buah	0	1 buah
Mesin potong rumput	1 buah	0	1 buah
Generator	1 buah	0	1 buah
Kamera	2 buah	0	2 buah

Berikut ini tabel analisa kebutuhan dan kekurangan sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun 2023:

TABEL 2.2.4

Analisa Kebutuhan dan Kekurangan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah yang Ada Sekarang	Standar Kebutuhan	Keterangan	Kekurangan
1.	Kursi Pertemuan	143 buah	200 buah	- 18 Orang Tenaga PKB/PLKB dan Tenaga Kontrak tidak punya tempat duduk di Kantor. - Tidak ada kursi yang disediakan khusus untuk kegiatan rapat di koordinasi lintas sector di kantor.	57 buah
2.	Scanner	-	4 Unit	- Tidak ada Scanner khusus untuk menscan laporan-laporan (Keuangan, Bidang PPKB, Bidang PPPA ( dokumen P2TP2A, Dokumen KLA, dll)	4 Unit
3.	AC	10 unit	14 unit	- Ruang Kerja, Ruang Layanan P2TP2A Sedungan dan Ruang Pertemuan.	4 Unit
4.	Laptop (yang support untuk Aplikasi)	0	4 Unit	- Laptop untuk Perencanaan dan Pelaporan kegiatan	4 unit
5.	Lemari Pakaian	0	2 Unit	- Layanan P2TP2A Sedungan	2 Unit
6.	Spring Bed	0	3 Unit	- Layanan P2TP2A Sedungan	3 Unit
7.	Lemari Es	1	2	- Layanan P2TP2A Sedungan	1 Unit
8.	Lemari Persediaan Kebutuhan	0	2	- Layanan P2TP2A Sedungan	2 Unit
9.	Meja Pelayanan dan Konsultasi	1 Unit	4	- Layanan P2TP2A Sedungan	3 Unit
10.	Kursi untuk pelayanan dan Klien	0	20 Unit	- Tidak ada kursi untuk pelayanan di P2TP2A sedungan	20 Unit
11.	Sofa Tamu	0	1 Unit	- Sofa pelayanan di P2TP2A sedungan	

## 2.3. Kinerja Pelayanan

### 2.3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020-2023

Sampai dengan tahun 2023, dari 21 (dua puluh dua) indikator kinerja, 11 (sebelas) di antaranya telah melebihi target tahunan/RPJMD, 5 (empat) capaiannya sama dengan target dan 5 (lima) lainnya masih di bawah target.

Sebelas indikator kinerja yang telah melebihi target tersebut adalah:

- Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 Perempuan dengan realisasi capaian 66,30% dengan persentase nilai 146,34%.
- Rasio Kekerasan terhadap Anak dengan realisasi capaian 0,4% dengan persentase nilai 125,79%.
- Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) dengan realisasi capaian 66,65% dengan persentase nilai 102,30%.
- Hasil penilaian Nilai SAKIP oleh Inspektorat dengan realisasi capaian skor 77,79 dengan persentase nilai 113,11%.
- Cakupan PUG yang aktif dengan realisasi capaian 96,67% dengan persentase nilai 223,08%.
- Persentase ARG pada belanja langsung APBD dengan realisasi capaian 30,51% dengan persentase nilai 227,36%.
- Persentase pemenuhan indikator KLA dengan realisasi capaian 58% dengan persentase nilai 116%.
- Persentase keluarga yang terdata dengan realisasi capaian 100% dengan persentase nilai 375,24%.
- TFR (Angka Kelahiran Total) dengan realisasi capaian indeks 2,28 dengan persentase nilai 101,33%.
- Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeed need) dengan realisasi capaian indeks 14,20% dengan persentase nilai 222,50%.
- Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE) dengan realisasi capaian 81,56% dengan persentase nilai 135,97%.

Sedangkan 5 (lima) indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target adalah:

- Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani dengan realisasi capaian 100,00% dengan persentase nilai 100,00%.

- Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak dengan realisasi capaian 35 dengan persentase nilai 100,00%.
- Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak dengan realisasi capaian 100% dengan persentase nilai 100,00%.
- Persentase korban kekerasan anak yang terlayani dengan realisasi capaian 92,06% dengan persentase nilai 99,96%.
- Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina dengan realisasi capaian 100,00% dengan persentase nilai 100,00%.

Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja yang belum memenuhi target adalah:

- IPG (*Indeks Pembangunan Gender*) dengan realisasi capaian 69,90% dengan persentase nilai 94,54%.
- IDG (*Indeks Pemberdayaan Gender*) dengan realisasi capaian 59,15% dengan persentase nilai 98,70%.
- Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait dengan realisasi capaian 0,039% dengan persentase nilai -1750%.
- Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun dengan realisasi capaian 22,40% dengan persentase nilai 89,60%.
- Persentase peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan realisasi capaian 14,30% dengan persentase nilai 21,95%.

Secara lebih rinci berikut adalah analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja :

- 1) IPG (*Indeks Pembangunan Gender*) dengan realisasi capaian 69,90% dengan persentase nilai 94,54%.
- 2) IDG (*Indeks Pemberdayaan Gender*) dengan realisasi capaian 59,15% dengan persentase nilai 98,70%.
- 3) Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 Perempuan dengan realisasi capaian 66,30% dengan persentase nilai 146,34%.
- 4) Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait dengan realisasi capaian 0,039% dengan persentase nilai -1750%.
- 5) Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) dengan realisasi capaian 66,65% dengan persentase nilai 102,30%.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR), di antaranya telah memperbanyak kerjasama dengan Faskes yang melayani Pelayanan KB melalui dana BOKB.

- 6) Hasil penilaian Nilai SAKIP oleh Inspektorat dengan realisasi capaian skor 77,79 dengan persentase nilai 113,11%.  
Hal tersebut didorong karena sudah adanya penguatan dan bimbingan penyusunan SAKIP yang aktif dilakukan oleh Bappeda Litbang, bagian Organisasi dan Inspektorat.
- 7) Cakupan PUG yang aktif dengan realisasi capaian 96,67% dengan persentase nilai 223,08%.  
Hal tersebut didorong karena sudah adanya penguatan kelembagaan PUG yang aktif.
- 8) Persentase ARG pada belanja langsung APBD dengan realisasi capaian 30,51% dengan persentase nilai 227,36%.
- 9) Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani dengan realisasi capaian 100,00% dengan persentase nilai 100,00%.

Pencapaian ini didorong beberapa di antaranya adalah:

- 2.1. Kerjasama dan sinergisitas yang baik antar OPD, lembaga pemerhati perempuan dan anak, wilayah dan sekolah lokus kejadian.
- 2.2. Sekolah dan wilayah cukup terbuka dengan adanya kejadian tindak kekerasan terhadap anak di sekolah/wilayahnya
- c. Sekolah dan wilayah mau bekerjasama dengan DPPPAPPKB dan mendukung dalam penanganan, pendampingan korban, reintegrasi dan psikoedukasi.
- 10) Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak dengan realisasi capaian 35 dengan persentase nilai 100,00%.

- 11) Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak dengan realisasi capaian 100% dengan persentase nilai 100,00%.

- 12) Persentase pemenuhan indikator KLA dengan realisasi capaian 58% dengan persentase nilai 116%.

Hal tersebut didorong karena keaktifan bidan PPPA dan bimbingan DP3APPKB Provinsi Kaltara sehingga Kota Tarakan bisa menjadi Kota Layak Anak Tingkat Pratama.

- 13) Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait dengan realisasi capaian 0,039% dengan persentase nilai -1750%.

- 14) Persentase korban kekerasan anak yang terlayani dengan realisasi capaian 100,00% dengan persentase nilai 100,00%.

Pencapaian ini didorong beberapa di antaranya adalah:

- a. Kerjasama dan sinergisitas yang baik antar OPD, lembaga pemerhati perempuan dan anak, wilayah dan sekolah lokus kejadian.
  - b. Sekolah dan wilayah cukup terbuka dengan adanya kejadian tindak kekerasan terhadap anak di sekolah/wilayahnya
  - c. Sekolah dan wilayah mau bekerjasama dengan DPPPAPPKB dan mendukung dalam penanganan, pendampingan korban, reintegrasi dan psikoedukasi.
- 15) Persentase keluarga yang terdata dengan realisasi capaian 100% dengan persentase nilai 375,24%.  
Dukungan dana baik dari BOKB dan APBD yang ada membuat pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga dapat dilakukan dengan lancar dan melebihi target.
- 16) TFR (Angka Kelahiran Total) dengan realisasi capaian indeks 2,28 dengan persentase nilai 101,33%.
- 17) Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun dengan realisasi capaian 22,40% dengan persentase nilai 89,60%.
- 18) Persentase peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan realisasi capaian 14,30% dengan persentase nilai 21,95%.  
Faktor penghambat secara garis besar dikarenakan masih berlangsungnya masa pandemi tepatnya sejak tahun 2019 sehingga calon akseptor menunda akses layanan KB di Puskesmas karena masih takut dengan situasi pandemic.
- 19) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) dengan realisasi capaian indeks 14,20% dengan persentase nilai 222,50%.  
Untuk mencapai target yang ditentukan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melakukan berbagai upaya, di antaranya:
- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi data yang dilakukan secara berkala untuk memantau pelaksanaan capaian target kinerja, sehingga dapat menekan angka *unmet need* melebihi target
  - b. Baksos pelayanan KB (dengan dana BOKB) turut mendukung pencapaian target
- 20) Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE) dengan realisasi capaian 81,56% dengan persentase nilai 135,97%.
- 21) Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina dengan realisasi capaian 100,00% dengan persentase nilai 100,00%.



Tabel.2.3.1

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2020-2024 (Renstra Periode yang Lalu)

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (permintaan realisasi/target*100%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	IPG			✓	91,90	92,00	92,10	92,29	92,30	91,90	92,00	92,06			100,00	100,00	99,96		
2	IDG			✓	59,72	59,73	59,93	60,13	60,33	59,72	58,92	59,15			100,00	98,64	98,70		
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 Perempuan			✓	18,89	18,72	18,50	17,20	17,95	0,04	0,07	29,01	66,30		199,79	199,62	1,95	146,34	
4	Rasio Kekerasan terhadap Anak			✓	18,89	18,72	18,50	17,20	17,95	0,04	0,07	0,10	0,40		129,86	129,53	128,68	125,79	
5	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)			✓	63,13	63,15	64,15	65,15	66,15	69,22	64,81	37,09	66,65		109,65	102,63	57,82	102,30	
6	Nilai SAKIP			✓	65,82	68,00	70,00	71,00	72,00	61,11	70,09	77,79			92,84	103,07	111,13		
7	Cakupan PUG yang aktif		✓		10,00	23,33	33,33	43,33	53,33	-	23,33	-	96,67		-	100	-	223,08	
8	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		✓		-	10,00	10,00	11,00	12,00	-	15,04	53,72	30,51		-	150,40	537,20	277,36	
9	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani		✓		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak		✓		30	30	30	35	35	10	0,20	0,20	35		30	0,67	0,67	100	

11	Percentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	✓		100	100	100	100	100	-	100	100	-	-	100	100	100	
12	Percentase pemenuhan indikator KLA	✓		-	20,83	33,33	50,00	62,50	-	-	50	58	-	-	150,02	116	
13	Percentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	✓		-	0,023	0,022	0,021	0,020	-	35	2,6	0,039	0,023	-	151.973,91	-	11.104,35
14	Percentase korban kekerasan anak yang terlayani	✓		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Percentase keluarga yang terdata	✓		4,00	8,88	17,77	26,65	35,53	4,00	91,92	75,31	100		1034,77	423,89	375,24	
16	TFR (Angka Kelahiran Total)	✓		2,30	2,29	2,28	2,25	2,24	2,30	2,25	2,24	2,28	100,00	97,82	107,02	101,33	
17	Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun	✓		-	25,00	25,00	25,00	25,00	48,60	21,80	23,29	22,40	-	87,19	93,16	89,60	
18	Percentase peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	✓		25,98	63,15	64,15	65,15	66,15		6,52	5,93	14,30	62,13	10,33	9,24	21,95	
19	Percentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeed need)	✓		25,98	24,50	24,25	24,00	23,50	25,98	32,31	31,95	14,20	100,00	-56,20	-10,00	222,50	
20	Percentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	✓		-	50,00	55,00	60,00	65,00	100,00	99,38	99,38	81,58	-	198,76	180,69	135,97	
21	Percentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	✓		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	

### 2.3.3. *Capaian Kinerja Anggaran SKPD 2017 – 2021*

Gambaran anggaran dan realisasi pendanaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan selama tahun 2020 – 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.3.3.1  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Belanja Tidak Langsung	4.961. 443.4 40	4.993.0 21.440	3.969. 429.5 76	4.361.3 72.533	4.797.5 09.786	3.610. 498.2 78	3.761.0 01.585	3.502.7 13.978	3.502.7 13.978	3.696.2 14.978	72,3 1	75,33	113,3 2	80,31	77,04		
Belanja Langsung	839.8 05.00 0	3.636.3 47.942	3.557. 958.6 71	3.588.1 31.675	3.692.3 43.880	2.430. 846.3 08	3.097.4 76.130	4.315.8 20.701	406.668 .098	5.618.8 95.992	85,1 8	85,18	82,44	11,33	152,1 8		
Belanja Operasi								6.918.8 60.679	6.860.1 37.980	7.666.8 30.490							
Belanja Modal								899.674 .000	689.244 .096	1.648.2 80.480							

Tabel. 2.3.3.2

Anggaran dan Realisasi Serapan Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	33.088.000	214.986.233	250.000.000	264.981.730		22.664.000	208.474.560	247.555.000	262.742.700		68,50	96,97	99,02	99,16			
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	289.746.407	199.765.204	54.852.700		84.455.393	102.682.708	44.391.280		-	29,15	51,40	80,93				
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	24.868.690	29.500.240		-	23.643.800	29.193.550		-	-	95,07	98,96				
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-	9.994.440				7.226.600			-	-	72,31					
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	14.925.169	9.993.330	149.938.200		12.249.200	9.460.000	139.385.480		-	82,07	94,66	92,96				
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	269.065.587	426.871.094	109.991.186		54.851.992	290.621.546	101.115.675		-	20,39	68,08	91,93				
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	186.906.202	81.434.954	313.676.403		177.740.640	74.639.508	264.670.927		-	95,10	91,66	84,38				

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.449.606,962	796.516,598	877.430,823	1.879.367,792		914.602,149	749.033,303	632.127,079	1.744.352,565		63,09	94,04	72,04	92,82		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS)	-	103.200,000	1.323.580,000	948.088,101		103.200,000	768.666,000	744.155,271		-	100,00	58,07	78,49			
PRAGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	16.744.000					16.002,000					95,57					
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEDLAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	124.911,040					85.700,000					68,61					
PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	56.163.078					0					0,00					

Dari tabel 2.3.3.2 di atas terlihat bahwa penyerapan anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar 89.89% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 86.40%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 94.25%.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi.

#### **2.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan memberikan layanan perlindungan perempuan, anak dan keluarga berencana kepada seluruh penduduk Kota Tarakan di Kota Tarakan.

Adapun Mitra Perangkat Daerah yang telah atau sedang memiliki Kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

1. Rumah Sakit dan Bidan Praktek Mandiri terkait dengan alokan dan pemeriksaan KB
2. Rumah Sakit Angkatan Laut
3. TNI AD ( TMMD )
4. Kepolisian ( Simponi dan layanan KDRT dan anak )
5. Dukungan Lintas Sektoral sebagai berikut :
  - a. Dinas Sosial Kota Tarakan terkait dengan data resiko stunting yang menerima Bantuan Sosial
  - b. Dinas Kesehatan terkait dengan pelayanan KB
  - c. Dinas Pendidikan ( Bina Kesehatan Remaja, PIK-R, Forum Anak, Sekolah Ramah)
  - d. Kelurahan
  - e. Kecamatan
  - f. PATBM
  - g. PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)

### *III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI*



### 3. Permasalahan dan Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam Bab IV RPJMD Kota Tarakan periode tahun 2025 – 2026, disebutkan beberapa permasalahan pembangunan yang ada di Kota Tarakan, antara lain adalah kesenjangan ekonomi, kemampuan bersaing pelaku perdagangan kecil masih relatif rendah dibandingkan dengan pelaku perdagangan besar, pengembangan ekonomi kreatif yang belum optimal, perlunya peningkatan potensi pariwisata, pengawasan perizinan investasi belum optimal, masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih rendahnya sarana prasarana pendukung olahraga dan kepemudaan, masalah kesatuan bangsa dan politik, masalah ketertiban dan keamanan, tingginya minat untuk bersekolah di Kota Tarakan, upaya peningkatan kualitas kesehatan belum optimal, upaya peningkatan keluarga sejahtera belum optimal, jumlah taman dan RTH belum menunjukkan peningkatan, meningkatnya pemanfaatan lahan untuk jasa dan perusahaan, pengelolaan sampah dan limbah belum optimal, kinerja pelayanan air minum/air bersih masih rendah, pencemaran air sungai masih terjadi, permasalahan transportasi perkotaan, belum optimalnya pelayanan terkait kebencanaan, dan masalah tertib administrasi kependudukan dan kepadatan penduduk.

Dari beberapa permasalahan pembangunan tersebut, yang terkait erat dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan adalah permasalahan masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, upaya peningkatan kualitas kesehatan belum optimal, dan upaya peningkatan keluarga sejahtera belum optimal.

Upaya menghambat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui peningkatan peran satgas P2TP2A, puskesmas, Pengadilan Agama, penyintas kekerasan, jejaring/mitra kerja untuk bersinergi menurunkan angka kekerasan. Selain itu telah dilakukan kerjasama dan sinergisitas yang baik antar OPD, lembaga pemerhati perempuan dan anak, wilayah dan sekolah lokus kejadian.

Kerjasama juga menyasar ke sekolah dan wilayah, sehingga sekolah dan wilayah cukup terbuka

dengan adanya kejadian tindak kekerasan terhadap anak di sekolah/wilayahnya dan pada akhirnya mau bekerjasama

dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mendukung dalam hal penanganan, pendampingan korban, reintegrasi dan psikoedukasi.

Upaya peningkatan kualitas kesehatan, khususnya yang terkait dengan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui program KB dan upaya peningkatan kesehatan reproduksi. Permasalahan lainnya yaitu permasalahan upaya peningkatan keluarga sejahtera. Upaya peningkatan keluarga sejahtera disini terkait dengan indikator penerapan 8 fungsi keluarga dalam rumah tangga, yakni fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsi lingkungan, yang merupakan salah satu terjemahan dari program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Selain permasalahan-permasalahan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bersama-sama dengan Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga menjadi OPD pendukung dalam penyelesaian permasalahan kemiskinan dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat sebagai SKPD utama.

Permasalahan-permasalahan secara rinci yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik;
- 2) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
- 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

2. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

1) Belum optimalnya kelembagaan PUG yang dapat dilihat dari capaian tahun 2021 sebesar 78,89% dan pelaksanaan PPRG yang dapat dilihat dari capaian tahun 2021 sebesar 83,33%.

2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain yaitu 59,15 (Data BPS, 2022).

4) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen;

5) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan;

6) Belum optimalnya pelibatan kelompok gender dalam tematik pembangunan sesuai amanat SDG'S

3. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:

1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT;

2) Belum semua korban kekerasan mendapat penanganan optimal. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan Perempuan sangat rentan terhadap kekerasan;

3) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana

4. Permasalahan terkait perlindungan anak:

1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pedagang asongan anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH);

2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime;

3) Belum efektifnya penanganan perkawinan anak;

4) Belum optimalnya penanganan anak dengan narkoba;

5) Belum semua kelurahan memiliki Taman Bermain Ramah Anak

6) Belum optimalnya pemenuhan semua indicator KLA

7) Belum semua anak memiliki Kartu Identitas Anak ( KTA )

5. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:

1) Belum optimalnya focus ke sekolah ramah anak dan masjid ramah anak

2) Masih adanya Balita stunting

6. Permasalahan terkait kelestarian ber KB dengan capaian penggunaan kontrasepsi modern oleh pasangan usia subur, tingkat drop out ber KB, dan median usia kawin pertama:

1) Kurang optimalnya penggunaan KB modern.

- 2) Jumlah PKB (15 orang) belum sebanding dengan jumlah kelurahan. Masing-masing PKB mendampingi 2 sampai 3 kelurahan.
- 3) Kurang optimalnya pembinaan pada Kampung KB
- 4) Masih adanya balita stunting di Kota Tarakan
- 5) Belum optimalnya pemutakhiran data keluarga
- 6) Belum tercapainya angka unmeed need sesuai pencapaian nasional
7. Permasalahan terkait Peningkatan kualitas kelompok kegiatan yang terkait dengan revitalisasi pembinaan kelompok kegiatan, metode dan sarana untuk melakukan KIE (komunikasi, infomasi dan edukasi):
  - 1) Masih diperlukan peningkatan kualitas kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR dan BKL),
  - 2) Masih diperlukan peningkatan kualitas kelompok UPPKS
  - 3) Masih diperlukan peningkatan kualitas kelompok PIK R
8. Permasalahan terkait kerjasama lintas sektoral: masih diperlukan penguatan advokasi dan kerjasama lintas sektoral, baik lembaga pemerintah maupun swasta.

## IV. TUJUAN DAN SASARAN



## 4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan Capaian Strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tarakan yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun. Perumusan Tujuan Pembangunan Kota Tarakan secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPD ( Rencana Pembangunan Daerah ) Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026 , Kebijakan Pembangunan Daerah dan Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Tarakan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) Program Perangkat Daerah. Sasaran RPD ( Rencana Pembangunan Daerah) berisi sasaran pokok RPD ( Rencana Pembangunan Daerah ) periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan Daerah Kota Tarakan merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan Kota Tarakan 2005-2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran , maka perlu penyelarasan tujuan dan Sararan Rencana Pembangunan Daerah ( RPD ) Tahun 2025 – 2026. Tujuan dari RPD Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026 adalah pada :

1. Tujuan ke I yaitu Terwujudnya Meningkatnya Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia, dengan sasaran Meningkatnya kualitas layanan pendidikan dan perlindungan sosial dengan indikator Indeks Pembangunan Keluarga dan Ketimpangan Keluarga, .
2. Tujuan ke III yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien serta Berdaya Saing, dengan sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dengan Nilai Sakip.

### 4.1. Tujuan dan Sasaran OPD

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diuraikan sebagai berikut:

**1. Meningkatkan Kesetaraan Gender**

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan.

**2. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.**

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- Meningkatnya peran perempuan, anak, keluarga, masyarakat dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak

**3. Meningkatnya Keluarga Sejahtera**

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- Mewujudkan Keluarga Berkualitas

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran DPPPAPPKB disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1.

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 -2026

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
				2025	2026
Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	IPG	92,3	92,3
			IDG	60,13	60,13
Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Predikat Anugrah Parahita Ekapraya (APE)	Meningkatnya peran perempuan, anak, keluarga, masyarakat dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP)	0,03	0,02
	Indeks Perlindungan Anak		Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA)	0,12	0,10
Meningkatnya Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Mewujudkan keluarga berkualitas	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	67,2	68,25

#### 4.2. Cascading Kinerja

---

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja utama dan atau target indikator kinerja kunci secara vertikal dari level unit pegawai yang lebih tinggi ke level unit pegawai yang lebih rendah dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan.

Sebagaimana dihasilkan pada cascading kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sesuai dengan tabel dibawah ini.

Tabel 4.2

CASCADING DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2026

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran Stategis PD	Formula /Rumus	Sasaran Strategis Bidang	Indikator Sasaran Bidang	Program	Indikator Kinerja Program	Formula /Rumus	Sasaran Strategis Seksi	Indikator Sasaran Seksi	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	PD	Ket	
8	9	10	11		13	14	16	17		18	19	20	21			20	21	
Meningkatkan kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender	IPG : 1/3 [Xede (1) + Xede (2) + Linc-Dist] Xede (1) = Xede untuk harapan hidup Xede(2) = Xede untuk pendidikan Linc-dist = Indeks distribusi pendapatan	Meningkatnya implemen tasi PUG pada Pemerintah Daerah	Persen tase ARG pada APBD	Program Pengar uas Utamaan Gender Dan Pember dayaan Perempuan	Cakupa n PUG yang aktif	Jumlah kelembaga gaan PUG aktif/jumlah kelembaga gaan PUG dikali 100	Meningkatnya kapasitas kader perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG	Pelembaga n Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kabupaten/kota yang dilatih PUG	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/kota	SEKSI PEMBER DAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN		

		Indeks Pemberdayaan Gender	IDG: 1/3 (Ipar+ID M+Lin-Dist) Ipar= indeks keterwakilan di parlemen IDM= indeks pengaruh bilan keputusan Linc= indeks distribusi pendapatan.	Meningkatnya besaran ARG pada APBD Pemerintah Daerah					Jumlah kader perempuan yang mengikuti pembinaan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	
Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Predikat Anugrah Parahita Ekpraya (APE)	Meningkatkan peran perempuan, anak, keluarga, masyarakat dalam perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak anak	Prevaleensi kekerasan terhadap perempuan (KtP)	<b>KtP = jumlah perempuan usia 15-64 tahun yang pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan pasangan dan selain pasangan</b>	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlalai i dikali 100 / Jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan	Meningkatnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

	n dibagi dengan jumlah seluruh perempuan usia 15-64 tahun di Kota Tarakan dikalikan 100							Kewenangan Kabupaten/Kota	n/Kota Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		
		Meningkatnya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang mendapat pelayanan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang mendapat pelayanan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang mendapat pelayanan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi

										n Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten /Kota	Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewena ngan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewena ngan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewena ngan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Peningkata n Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberda yan Perempuan Kewenang an Kabupaten /Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penangan an bagi Perempua n Korban Kekerasan Kewenang an Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkat an Kapasitas							

				Persentase Puspag aktif	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Puspaga aktif	Jumlah puspaga yang aktif dibagi dengan jumlah kecamatan di Kota Tarakan dikali 100	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah media KIE yang memuat informasi kesetaraan gender dan hak anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media KIE yang memuat informasi kesetaraan gender dan hak anak	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
												Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		

								Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					
								Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak / jumlah semua OPD dikali 100	Meningkatkan kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam Kelembagaan aata di tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten /Kota	

Indeks Perlindungan Anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak (KtA)	KtP = jumlah anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan orang tua dan selain orang tua dibagi dengan jumlah seluruh anak usia 13-17 tahun di Kota Tarakan dikalikan 100	Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak Layak Anak	Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak	Program Pemerintahan Hak Anak (PHA)	Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak	Nilai indikator Kota Layak Anak 300-500 (skala 0-1000)	Meningkatkan kegiatan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang berkoordinasi, bersinergi, serta mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemerintahan Hak Anak	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang berkoordinasi, bersinergi, serta mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemerintahan Hak Anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemerintahan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerinta h, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemerintahan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	SEKSI PERLINDUNGAN DAN PEMERINTAHAN HAK ANAK	
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	
														Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	

									Kabupaten /Kota	an Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
									Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	

										Kabupaten /Kota	Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlalui	Jumlah anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar dibagi Jumlah seluruh anak yang mengalami kekerasan dikali 100	Meningkatnya peran Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berkoordinasi, bersinergi, dan mendapat Advokasi Kebijakan serta Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah lembaga yang berkoordinasi, bersinergi, dan mendapat Advokasi Kebijakan serta Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah lembaga yang berkoordinasi, bersinergi, dan mendapat Advokasi Kebijakan, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			

							Meningkatkan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Anak yang Terlayani Pengaduan dan Rujukan Lanjutan bagi Anak korban kekerasan, diskriminasi dan yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Anak yang Terlayani Pengaduan dan Rujukan Lanjutan bagi Anak korban kekerasan, diskriminasi dan yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		
							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				

										Daerah Kabupaten/ Kota	a Penyedi a Layanan Anak yang Memerl ukan Perlindu ngan Khusus	Penyediaa n Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ kota	Jumlah AMPK yang memperole h Bantuan Kebutuha n Khusus							
Mening katnya Keluarg a Sejahe ra	Persen tase pemak aiian kontra sepsi moder n (mCPR )	Mening katnya Aseptor KB	Persent ase pemaka ian kontras epsi modern (mCPR)	Jumlah PUS penggu na kontras epsi modern dikali 100 dibagi Jumlah PUS	Mening katnya Asepto r KB	Total Fertilit y Rate	Program Pengend alian Pendud uk	Persen tase keluarg a yang terdata	Jumlah keluarga yang terdata kali 100 dibagi jumlah semua keluarga se-Kota Tarakan	Meningkatnya upaya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah dokume n data keluarga	Pemetaan Perkiraan Pengendali an Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah dokume n data keluarga	Penyediaa n dan Pengolah an Data Kependud ukan	Jumlah Dokumen Penyediaa n dan Pengolah an Data Kependud ukan	SEKSI PENGEN DALIAN PENDUD UK				



				Persentase pemakaiannya kontra sepsi moderator (mCPR )	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase masyarakat yang terpapar isi program KKBPK (advokasi dan KIE) dikali 100 dibagi dengan Jumlah sasaran masyarakat Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	SEKSI PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA
				Unmet need									Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media

										Luar Ruang		
										Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	

									Pelaksanaan Mekanism e Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcum ), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes ), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanism e Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes ), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
									Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	

										(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)							
										Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK						
										Meningkatnya Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga penyuluhan KB dan petugas lapangan KB yang aktif	Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga penyuluhan KB dan petugas lapangan KB yang aktif	Jumlah tenaga penyuluhan KB dan petugas lapangan KB yang aktif	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	

									Penggerak an Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggera kan Kader Institusi Masyarak at Pedesaan (IMP)							
									Meningkatnya Pengendalian dan Pendistribusia n Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah pelayan an KB	Pengendali an dan Pendistribu sian Kebutuhan Alat dan Obat Kontraseps i serta Pelaksanaa n Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayan an KB	Pengendali an Pendistrib usian Alat dan Obat Kontraseps i dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengenda lian Pendistrib usian Alat dan Obat Kontrasep si dan Sarana Penunjan g Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringny a	Peningkata n Kesertaan Penggunaan Metode Kontraseps i Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Pengguna an Metode Kontrasep si Jangka	

										Panjang (MKJP)		
										Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	
										Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	

								Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kebersertaan Ber-KB	Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berperan scr aktif dlm pengelolan program KKBPK	Pemberdayaan dan Peningkata n Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berpera n scr aktif dlm pengelolan program KKBPK	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		
										Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				

					Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	Jumlah kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina dikali 100 dibagi dengan seluruh jumlah kader	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	SEKSI PEMERDAYAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
--	--	--	--	--	--	---	---	--	-----------------	---	-----------------	---	--	--

									Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKS)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkata n Pendapata n Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkata n Pendapata n Keluarga Akseptor (UPPKA)	
								Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkata	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,	

										n Pendapat a Keluarga Akseptor (UPPKA)	PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					
										Meningkatkan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin /Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

												Pendampi ngan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin /Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin /Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapatkan pendampingan		
Meningkatkan tata kelola pemerintah	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh APIP (SKOR APIP)	Meningkatnya kualitas pengendalian internal	Per센tase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Per센tase Layanan Penunjang perangkat daerah yang terpenuhi dikali 100 dibagi dengan jumlah layanan penunjang perangkat daerah	Jumlah layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi dikali 100 dibagi dengan jumlah layanan penunjang perangkat daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administ rasi Keuanga n yang diselesai kan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administ rasi Keuanga n yang diselesai kan tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	SUBBAGI AN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			

							Meningkatnya jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah layanan Administ rasi Kepega waian	Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administ rasi Kepega waian	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap an			
							Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administ rasi umum yang terlaksa na	Administra si Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administ rasi umum yang terlaksa na	Penyediaa n Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
										Penyediaaa n Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan				
										Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BM D yang diadaka n	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BM D yang diadaka n	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

								Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
								Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BM D yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BM D yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkannya Pajaknya		
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkanya		

										Operasi al atau Lapangan	n Pajak dan Perizinan nya	
										Pemelihara aan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	

Tarakan, 05 Januari 2024

Mengetahui

KEPALA DINAS



Hasman Parigi, S.E., M.M

Pembina / VI a

NIP. 19720822 2010011 001



## V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



## 5. Strategi dan Arah Kebijakan

---

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kesetaraan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)
			Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Meningkatnya peran perempuan, anak, keluarga, masyarakat dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Tersedianya Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
	Peningkatan pencegahan dan perlindungan perempuan	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
		Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan

		Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi
		Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak	Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada

		Peningkatan pencegahan dan perlindungan khusus anak	Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
			Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten
			Tersedianya Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
Meningkatnya Keluarga Sejahtera	Mewujudkan keluarga Berkualitas	Peningkatan kualitas data keluarga	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

			Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
			Tersedianya Data dan Informasi Keluarga
			Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
			Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
	Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi pelaksanaan program KKBPK		Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
			Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK
			Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
			Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
			Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
			Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
			Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan

		Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
		Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
		Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
		Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
		Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB
		Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
		Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
		Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
	Penguatan pemberdayaan dan peningkatan keluarga berkualitas	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

		(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
		Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
		Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
		Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
		Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
		Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

Meningkatnya tatakelola pemerintah daerah yang efektif dan efisien	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana	Meningkatkan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya Dokumen ASN yang KGB ,Cuti, BUP, KP4, Kenaikan Pangkat.</li> <li>Terprosesnya Satya Lencana ASN</li> <li>Tersedianya KARIS / KARSU / KARPEG, DUK, SIMPEG.</li> <li>Terkelolanya Surat Masuk Dan Surat Keluar</li> <li>Terkelolanya Konsep Surat Keluar</li> <li>Terkelolanya Surat Keputusan ( SK )</li> <li>Terprosesnya Arsip Surat Sub Bagian Umum</li> <li>Terolahnya Dokumen BMD</li> <li>Terolahnya Dokumen Persediaan Barang Pakai Habis</li> <li>Tersedianya Dokumen Penganggaran (RKA/DPA; RKAP/DPAP)</li> <li>Tersedianya Dokumen Perencanaan (Ranwal Renja, Renja, Renja Perubahan, Renstra)</li> <li>Terinputnya Dokumen RKA/DPA pada Aplikasi SIPD</li> <li>Terinputnya Dokumen DPA pada Aplikasi SiRUP</li> <li>Tersusunnya Dokumen PK (Perjanjian Kinerja )</li> <li>Terverifikasinya Dokumen SPP dan SPM Administrasi Keuangan</li> <li>Terprosesnya Dokumen KGB,KP4 Kenaikan Pangkat dan Tunjangan Kinerja</li> <li>Terprosesnya Dokumen SPP,SPM, administrasi Keuangan dan kelengkapan lainnya</li> </ul>
--	---	--	--

			Terverifikasiinya Dokumen SPJ dan SPD Kegiatan Administrasi Keuangan
			Tersedianya SPD
			Terarsipnya Dokumen SP2D
			Terverifikasiinya Laporan Evaluasi dan Pajak
			Tersedianya Laporan Fisik dan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran
			Tersedianya laporan Evaluasi dan Monitoring Renja dan Kinerja
			Tersedianya Dokumen Menegemen Resiko (RTP/MR)
			Tersedianya Laporan SPT Tahunan
			Tersedianya Laporan Pajak Kegiatan untuk pemeriksaan dan Rekonsiliasi
			Tersedianya Laporan Realisasi dan rekap anggaran perubahan gaji dan tunjangan



## VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN



## **6. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan**

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, maka disusunlah Program dan Kegiatan beserta Pendanaannya yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TA 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Capai an Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	
							Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Meningkatkan Kesetaraan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	2 0 0 2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Terlaksananya Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan PUG yang aktif		12%	263.84 2.640	15%	263.84 2.640	15%	263.84 2.640		
		2 0 0 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG	1 lembaga	1 lembaga	13.842. 640	1 lembaga	13.842. 640	1 lembaga	13.842. 640		

	2	0	0	2	2.	00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30	OPD	30	OPD	13.842.	640	30	OPD	13.842.	640
	2	0	0	2	2.	03	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah lembaga yang dibina</i>	2	lembaga	2	lembaga	250.00	0.000	2	lembaga	250.00	0.000
	2	0	0	2	2.	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2	lembaga	2	lembaga	250.00	0.000	2	lembaga	250.00	0.000

							Kewenangan Kabupaten/Kota									
Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Meningkatkan peran perempuan, anak, keluarga, masyarakat dalam perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak anak	2	08	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terlaksananya Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	100%	100%	147.65 1.920	100%	147.65 1.920	100%	147.65 1.920			
		2	0 8	0 3	2. 0	1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	7 kegiatan	20.041. 860	7 kegiatan	20.041. 860	7 kegiatan	20.041. 860	

	2	0	0	2.	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,Program dan Kegiatan Pencegahan KekerasanTerhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		4	Doku men	20.041. 860	5	Doku men	20.041. 860	5	Doku men	20.041. 860	
	2	0	0	2.	02	<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kasus yang mendapat pelayanan (data simponi)</i>	111 kasus	90	kasus	108.75 8.360	80	kasus	108.75 8.360	80	kasus	108.75 8.360	
	2	0	0	2.	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	111 orang	90	orang	15.369. 500	80	orang	15.369. 500	80	orang	15.369. 500	

	2	0	0	2.	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 layanan	4 layanan	93.388.860	4 layanan	93.388.860	4 layanan	93.388.860
	2	0	0	2.	00	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang didampingi</i>	1 lembaga	1 lembaga	18.851.700	1 lembaga	18.851.700	1 lembaga	18.851.700
	2	0	0	2.	00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 orang	18.851.700	50 orang	18.851.700	50 orang	18.851.700	

	2	0	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Terlaksananya PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Puspusga yang aktif		25%	45.649. 290	25%	45.649. 290	25%	45.649. 290	
	2	0	0	0	2.		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media KIE yang memuat informasi kesetaraan gender dan hak anak yang terdistribusi	100 buah	23.346. 570	100 buah	23.346. 570	100 buah	23.346. 570		
	2	0	0	0	2.	00	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	13.946. 700	1 dokumen	13.946. 700	1 dokumen	13.946. 700		
	2	0	0	0	2.	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	9.399.8 70	1 dokumen	9.399.8 70	1 dokumen	9.399.8 70		

						Kewenangan Kabupaten/Kota									
2	0	0	0	2.	0	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah organisasi yang dikuatkan dan dikembangkan</i>	2 <i>organisasi</i>	2 <i>organisasi</i>	12.362. 920	2 <i>organisasi</i>	12.362. 920	2 <i>organisasi</i>	12.362. 920
2	0	0	0	2.	00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	12.362. 920	30 orang	12.362. 920	30 orang	12.362. 920	

	2	0	0	2.		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak		40	layanan	9.939.800	40	layanan	9.939.800	40	layanan	9.939.800
	2	0	0	2.	00	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Ke setaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		40	layanan	9.939.800	40	layanan	9.939.800	40	layanan	9.939.800
	2	0	0	5		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Terlaksananya PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Percentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak		100%	5.451.960	100%	5.451.960	100%	5.451.960			

	2	0	0	0	2.		<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam KelembagaanData di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam KelembagaanD ata di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen responsif gender</i>		<i>1 dokumen</i>	<i>5.451.960</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>5.451.960</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>5.451.960</i>
	2	0	0	0	2.	00	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anakdalam Kelembagaan Data di KewenanganKabupaten/Kota	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		<i>1 dokumen</i>	<i>5.451.960</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>5.451.960</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>5.451.960</i>
	2	0	0	0	2.		<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Terlaksananya PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Ketercapaian nilai indikator penilaian mandiri Kota Layak Anak</b>	800	875	265.25 1.100	880	265.25 1.100	880	265.25 1.100
	2	0	0	6	2.	01	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk</i>	<i>1 Gugus Tugas</i>	<i>1 Gugus Tugas</i>	<i>93.364.680</i>	<i>1 Gugus Tugas</i>	<i>93.364.680</i>	<i>1 Gugus Tugas</i>	<i>93.364.680</i>

	2	0	0	2.	00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	39 organi sasi	39 organi sasi	55.659. 360	39 organi sasi	55.659. 360	39 organi sasi	55.659. 360
	2	0	0	2.	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokum en	1 dokum en	37.705. 320	1 dokum en	37.705. 320	1 dokum en	37.705. 320
	2	0	0	2.	00	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif</i>	<i>Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif</i>	<i>4 Lemba ga</i>	<i>4 Lemba ga</i>	<i>171.88 6.420</i>	<i>4 Lemba ga</i>	<i>171.88 6.420</i>	<i>4 Lemba ga</i>	<i>171.88 6.420</i>

	2	0	0	2.	00	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	150.00 0.000	1 dokumen	150.00 0.000	1 dokumen	150.00 0.000
	2	0	0	2.	00	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 Dokumen	21.886. 420	1 Dokumen	21.886. 420	1 Dokumen	21.886. 420
	2	0	0	7		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Terlaksananya PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Percentase korban kekerasan anak yang terlayani</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>81.560. 360</b>	<b>100%</b>	<b>158.33 6.087</b>	<b>100%</b>	<b>158.33 6.087</b>
	2	0	0	7	2.	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup</b>	<b>Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak</b>	<b>3 kegiatan</b>	<b>4 kegiatan</b>	<b>30.084. 000</b>	<b>4 kegiatan</b>	<b>30.084. 000</b>	<b>4 kegiatan</b>	<b>30.084. 000</b>

2	0	0	0	2.	00	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahanKTA	<i>DaerahKabupaten/Kota</i>	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	39	Perang kat daerah	30.084.000	39	Perang kat daerah	30.084.000	39	Perang kat daerah	30.084.000		
2	0	0	0	2.	02	<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang MemerlukanKoordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang MemerlukanKoordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kasus anak</i>	98	<i>kasus</i>	90	<i>kasus</i>	30.084.000	80	<i>kasus</i>	106.859.727	80	<i>kasus</i>	106.859.727	
2	0	0	0	2.	05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan	98	kasus	90	kasus	22.635.197	80	kasus	22.635.197	80	kasus	22.635.197	

# **RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERIODE TA 2025-2026**

						Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	0	0	2.	00	06	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	1 laporan	84.224.530	1 laporan	84.224.530	1 laporan	84.224.530
2	0	0	2.	0	3	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan yang mendapatkan pendampingan</i>	<i>Jumlah lembaga penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan yang mendapatkan pendampingan</i>	5 Lemba ga	21.392.360	5 Lemba ga	21.392.360	5 Lemba ga	21.392.360
2	0	0	2.	00	06	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000

		2	0	0	2.	00	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Tersedianya Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPKtingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus (anak berkasus, anak mengalami bencana)		20 orang	20.392.360	20 orang	20.392.360	20 orang	20.392.360		
Meningkatnya Keluarga Berkualitas	Meningkatnya Aseptor KB	2	1	0	2.	02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				251.35 5.370		4.095.6 38.090		4.095.6 38.090			
		2	1	0	2.	02	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Terlaksananya PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase keluarga yang terdata	35%	50%	90.237. 520	65%	90.237. 520	65%	90.237. 520		
		2	1	0	2.	02	<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen data keluarga</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>90.237. 520</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>90.237. 520</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>90.237. 520</i>		
		2	1	0	2.	00	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 dokumen	1 dokumen	14.400. 000	1 dokumen	14.400. 000	1 dokumen	14.400. 000		
		2	1	0	2.	00	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen	1 dokumen	49.958. 800	1 dokumen	49.958. 800	1 dokumen	49.958. 800		
		2	1	0	2.	00	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 laporan	1 laporan	20.878. 720	1 laporan	20.878. 720	1 laporan	20.878. 720		

	2	1	0	2	2.	00	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	1 dokumen	5.000.00	1 dokumen	5.000.00	1 dokumen	5.000.00
	2	1	0	3				<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Terlaksananya PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase masyarakat yang terpapar isi program KKBPK</b>	82%	84%	74.518.800	86%	74.518.800	86%	74.518.800
	2	1	0	3	2.	0	1	<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	<i>Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	<i>Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB</i>	3 layanan	3 layanan	68.518.800	3 layanan	68.518.800	3 layanan	68.518.800
	2	1	0	3	2.	0	08	Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 laporan	1 laporan	2.000.00	1 laporan	2.000.00	1 laporan	2.000.00
	2	1	0	3	2.	0	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 laporan	1 laporan	32.948.000	1 laporan	32.948.000	1 laporan	32.948.000

	2	1	0	2.	00	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 laporan	1 laporan	6.000.00	1 laporan	6.000.00	1 laporan	6.000.00
	2	1	0	2.	00	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	1 dokumen	2.800.00	1 dokumen	2.800.00	1 dokumen	2.800.00

	2	1	0	2.	00	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 dokumen	1 dokumen	14.770.800	1 dokumen	14.770.800	1 dokumen	14.770.800
	2	1	0	2.	00	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 organisasi	10 organisasi	10.000.000	10 organisasi	10.000.000	10 organisasi	10.000.000
	2	1	0	2.	02	<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>	<i>Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>	<i>Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang aktif</i>	<i>17 orang</i>	<i>17 orang</i>	<i>1.000.000</i>	<i>17 orang</i>	<i>1.000.000</i>	<i>17 orang</i>	<i>1.000.000</i>
	2	1	0	2.	00	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi	80 orang	80 orang	1.000.000	80 orang	1.000.000	80 orang	1.000.000

						Masyarakat Pedesaan (IMP)								
2	1 4	0 3	2. 0	2. 3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pel ayanan KB di Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah pelayanan KB	4 layana n	4 layana n	4.000.0 00	4 layana n	4.000.0 00	4 layana n	4.000.0 00
2	1 4	0 3	2. 0	00 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 lapora n	1 lapora n	1.000.0 00	1 lapora n	1.000.0 00	1 lapora n	1.000.0 00
2	1 4	0 3	2. 0	00 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	148 orang	148 orang	1.000.0 00	148 orang	1.000.0 00	148 orang	1.000.0 00

	2	1	0	2.	00	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	20 unit	1 unit	1.000.00	1 unit	1.000.00	1 unit	1.000.00	
	2	1	0	2.	00	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	1 laporan	1.000.00	1 laporan	1.000.00	1 laporan	1.000.00	
	2	1	0	2.	04	<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	<i>Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	<i>Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berperan scr aktif dlm pengelolaan program KKBPK</i>	85 mitra kerja	85 mitra kerja	2.000.00	85 mitra kerja	2.000.00	85 mitra kerja	2.000.00	
	2	1	0	2.	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 dokumen	1 dokumen	1.000.00	1 dokumen	1.000.00	1 dokumen	1.000.00	

	2	1	0	2.	00	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	1 dokumen	1 dokumen	1.000.00	1 dokumen	1.000.00	1 dokumen	1.000.00	
	2	1	0	4		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Terlaksananya PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Percentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	100%	100%	86.599.050	100%	86.599.050	100%	86.599.050	
	2	1	0	4	2.01	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Jumlah kegiatan</i>	<i>2 kegiatan</i>	<i>2 kegiatan</i>	<i>76.599.050</i>	<i>2 kegiatan</i>	<i>76.599.050</i>	<i>2 kegiatan</i>	<i>76.599.050</i>	
	2	1	0	4	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	1 laporan	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000

							Akseptor (UPPKA))								
2	1 4	0 4	2. 0	00 1	00 18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-Rdan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-Rdan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA )	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-Rdan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	20 unit	20 unit	9.999.0 50	20 unit	9.999.0 50	20 unit	9.999.0 50
2	1 4	0 4	2. 0	00 1	00 19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahananand Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKA)	Terlaksananya Orientasi/Pelati han Teknis Pelaksana/Kade r Ketahananand Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAksept or (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi/Pelati han Teknis Pelaksana/Kader Ketahananand Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAksept or (UPPKA)	1 lapora n	1 lapora n	46.600. 000	1 lapora n	46.600. 000	1 lapora n	46.600. 000

						KeluargaAkseptor (UPPKA)								
2	1 4	0 4	2. 0	00 28	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina KeluargaRemaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) danPemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina KeluargaRemaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha PeningkatanPen dapan Keluarga Akseptor (UPPKA) danPemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina KeluargaRemaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha PeningkatanPenda patan Keluarga Akseptor (UPPKA) danPemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	1 kelom pok	2 kelom pok	10.000. 000	2 kelom pok	10.000. 000	2 kelom pok	10.000. 000

	2	1	0	2.	00	<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berperan dalam Pembangunna Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	-	2 organiasi	10.000.000	2 organiasi	10.000.000	2 organiasi	10.000.000
	2	1	0	2.	05	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	1 laporan	5.000.00	1 laporan	5.000.00	1 laporan	5.000.00
	2	1	0	2.	06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS)	Jumlah Hasil Laporan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS)	1 laporan	1 laporan	5.000.00	1 laporan	5.000.00	1 laporan	5.000.00

						n PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)								
Meningkatnya tatakelola pemerintah daerah yang efektif dan efisien	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana	2	08	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Terlaksananya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi</b>	100%	100%	<b>3.931.789.883</b>	100%	<b>3.931.789.883</b>	100%	<b>3.931.789.883</b>
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 dokumen	1 dokumen	<b>10.000.000</b>	1 dokumen	<b>10.000.000</b>	1 dokumen	<b>10.000.000</b>					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000					

2	0	0	1	2.	0	2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu</b>	2	layanan	2	layanan	3.696.2	14.978	2	layanan	3.696.2	14.978	2	layanan	3.696.2	14.978	
2	0	0	1	2.	0	0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	org/bln	25	org/bln	3.637.2	88.978	25	org/bln	3.637.2	88.978	25	org/bln	3.637.2	88.978	
2	0	0	1	2.	0	0	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	dokumen	1	dokumen	58.926.000		1	dokumen	58.926.000		1	dokumen	58.926.000		
2	0	0	1	2.	0	6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana</b>	3	layanan	3	layanan	62.417.700		3	layanan	62.417.700		3	layanan	62.417.700		
2	0	0	1	2.	0	0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	1	paket	24.996.060		1	paket	24.996.060		1	paket	24.996.060		
2	0	0	1	2.	0	0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	2	paket	4.979.840		2	paket	4.979.840		2	paket	4.979.840		
2	0	0	1	2.	0	0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	laporan	7	laporan	32.441.800		7	laporan	32.441.800		7	laporan	32.441.800		
2	0	0	1	2.	0	7		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>Jumlah aset/BMD yang diadakan</b>	23	bah	23	bah	44.277.850		23	bah	44.277.850		23	bah	44.277.850		

										<i>Pemerintah Daerah</i>												
2	0	0	2.	00	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23	buah	23	buah	44.277.	850	23	buah	44.277.	850	23	buah	44.277.	850
2	0	0	2.	00	08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia</i>	2	layanan	2	layanan	73.516.	021	2	layanan	73.516.	021	2	layanan	73.516.	021
2	0	0	2.	00	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	1	laporan	2.000.0	00	1	laporan	2.000.0	00	1	laporan	2.000.0	00
2	0	0	2.	00	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	1	laporan	71.516.	021	1	laporan	71.516.	021	1	laporan	71.516.	021
2	0	0	2.	00	09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah aset/BMD yang dipelihara</i>	28	unit	30	unit	45.363.	334	30	unit	45.363.	334	30	unit	45.363.	334
2	0	0	2.	00	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	8	unit	8	unit	2.709.0	00	8	unit	2.709.0	00	8	unit	2.709.0	00

						Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya								
2	0	0	2.	0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	14 unit	32.784. 334	14 unit	32.784. 334	14 unit	32.784. 334
2	0	0	2.	0	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	15 unit	9.870.0 00	15 unit	9.870.0 00	15 unit	9.870.0 00

## VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



## 7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

### 7.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif.

Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan Pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja utama yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama dua tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran /RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,06	92,10	93,00	93,00	
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,15	60,15	65,15	65,15	
3	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)	0,03	0,03	0,02	0,02	
4	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)	0,12	0,12	0,10	0,10	
5	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	66,65	67,65	68,65	68,65	

## 7.2 Penentuan Target Kinerja *Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).*

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah Indikator Kerja yang mengambarkan keberhasilan penyelenggaraan keberhasilan suatu urusan Pemerintah. Indikator kinerja juga

dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun kuantitatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel 7.2**  
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Legeslatif	6,67%	20%	20%	20%
2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	30,51%	30,52%	30,64%	30,64%
3	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100%	100%	100%	100%
4	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	9,23%	9,12%	9,00%	9,00%
5	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,28	2,26	2,25	2,25
6	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	66,65%	67,65%	68,65%	68,65%
7	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14,59%	14,30%	14,25%	14,25%

Sedangkan cara perhitungan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat ditampilkan pada tabel berikut :

**RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA PERIODE TA 2025-2026**

Tabel 7.3

Cara Perhitungan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus
1	2	3	4
1.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung di APBD}} \times 100\%$
		2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	$\frac{\sum \text{anak(penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yg ditangani & dampingi instansi terkait}}{\sum \text{laporan pengaduan anak korban kekerasan}} \times 100\%$
		3. Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	$\frac{\sum \text{perempuan yang mengalami kekerasan}}{\sum \text{penduduk perempuan}} \times 100.000$

**RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA PERIODE TA 2025-2026**

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus
1	2	3	4
2.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR = \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{bi}{pi} \times k$ <p>TFR = angka kelahiran total            ASFR = angka kelahiran menurut kelompok umur            bi = jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu            pi = jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama            i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,..., i=7 untuk kelompok umur 45-49)            k = bilangan konstanta biasanya 1000</p>
		2. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
		3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	<p>Dijelaskan pada IKK Output</p> $\frac{\text{Jlh. Ingin Anak Tunda} + \text{Jlh. Tidak Ingin Anak Lagi}}{\text{Jlh. Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100$

## VIII. PENUTUP



## 8. Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Secara umum isi dokumen ini merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Renstra ini memuat informasi secara transparan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan yang merupakan target kinerja yang ingin dicapai, dengan mereview tujuan, sasaran, visi dan misi, capaian program dan kegiatan, serta capaian Pelayanan Perangkat Daerah lima tahun sebelumnya, dimana keberhasilan pencapaian target kinerja dan program kegiatan yang sudah disusun dalam Renstra ini menjadi tanggung jawab bersama baik di lingkungan Pemerintah, dunia usaha/swasta, maupun masyarakat.

Tarakan, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Hasman Parigi, S.E., M.M  
Pembina / VI a  
NIP. 19720822 2010011 001



---

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

